

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan sumber daya hutan yang memiliki peran krusial bagi pembangunan nasional, baik dari sisi ekologis maupun ekonomi. Kawasan hutan berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan melalui konservasi tanah, tata air, dan penyerapan karbon, sekaligus menyediakan berbagai komoditas yang bernilai ekonomi. Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor kehutanan masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengelolaan komoditas hutan yang lebih beragam, tidak terbatas pada hasil kayu semata (Badan Pusat Statistik, 2023). Oleh karena itu, pengembangan komoditas kehutanan bernilai ekonomi menjadi penting dalam mendukung kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional.

Salah satu pendekatan yang semakin relevan dalam pengelolaan kehutanan adalah pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Berdasarkan ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, HHBK didefinisikan sebagai hasil hutan hayati maupun nonhayati selain kayu yang berasal dari kawasan hutan dan dapat dimanfaatkan tanpa menebang tegakan utama. Pemanfaatan HHBK dipandang lebih selaras dengan prinsip kelestarian karena memungkinkan kegiatan ekonomi berjalan tanpa mengurangi fungsi utama hutan.

Selain itu, pengembangan HHBK juga mampu memperluas sumber pendapatan sektor kehutanan serta memberi peluang ekonomi bagi warga di sekitar kawasan hutan. Dengan demikian, HHBK menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang produktif dan berkelanjutan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No 77, 2019)

Getah pinus adalah salah satu komoditas dengan nilai ekonomi yang kuat di Indonesia di antara jenis produk HHBK lainnya. Getah pinus dihasilkan melalui proses penyadapan pohon pinus dan dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai kebutuhan industri, sehingga memiliki permintaan pasar yang relatif stabil. Di Pulau Jawa, pengelolaan getah pinus banyak dilakukan oleh Perum Perhutani sebagai badan usaha yang mengelola hutan negara. Melalui pengelolaan kawasan hutan pinus, getah pinus tidak hanya menjadi komoditas perdagangan, tetapi juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja serta aktivitas ekonomi masyarakat sekitar hutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa getah pinus memiliki posisi strategis sebagai salah satu komoditas kehutanan bernilai tambah (Perum Perhutani, n.d.-c).

Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, pengelolaan getah pinus menghadapi berbagai tantangan operasional. Tingkat produksi getah dipengaruhi oleh umur tegakan, kondisi cuaca, teknik penyadapan, kualitas tenaga kerja, serta kontinuitas pemeliharaan tanaman. Selain itu, lokasi tegakan pinus yang umumnya tersebar di kawasan perbukitan atau cukup jauh dari pusat pengumpulan hasil menimbulkan kendala dalam proses pengangkutan dan

distribusi. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dikelola secara efektif, pasokan getah pinus dapat berfluktuasi dan berdampak pada menurunnya efisiensi operasional. Oleh karena itu, potensi ekonomi getah pinus perlu didukung oleh sistem pengelolaan dan rantai pasok yang terencana agar manfaatnya dapat dimaksimalkan.

Perum Perhutani merupakan badan usaha milik negara yang memiliki mandat dalam pengelolaan hutan negara di wilayah Jawa dan Madura, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan berbagai produk hasil hutan, baik berupa kayu maupun nonkayu. Dalam menjalankan operasionalnya, Perhutani menerapkan sistem pengelolaan berjenjang melalui Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH), dan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) sebagai unit pelaksana di lapangan. Struktur tersebut dibentuk agar kegiatan perencanaan, pemeliharaan, produksi, hingga pengawasan kawasan hutan dapat dilaksanakan secara lebih efektif sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Dengan sistem kelembagaan tersebut, pengelolaan komoditas seperti getah pinus memerlukan koordinasi antartingkat organisasi agar proses produksi dan distribusi dapat berjalan secara optimal (Perum Perhutani, n.d.-e).

Salah satu unit kerja di bawah Perhutani yang memiliki peran dalam pengelolaan kawasan hutan adalah BKPH Banjarnegara yang berada dalam wilayah KPH Bandung Selatan. Berdasarkan profil resmi KPH Bandung Selatan, unit ini merupakan salah satu dari sembilan BKPH yang berada di bawah administrasi KPH Bandung Selatan. BKPH Banjarnegara membawahi tiga Resort Pemangkuan

Hutan (RPH), yaitu RPH Banjaran, RPH Lemburawi, dan RPH Logawa, dengan total cakupan wilayah kelola yang cukup luas. Keberadaan beberapa RPH di bawah BKPH Banjaran menunjukkan bahwa unit ini memiliki tanggung jawab operasional yang signifikan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan pada tingkat lapangan (Perum Perhutani, n.d.-d).

Sebagai unit kerja lapangan, BKPH Banjaran tidak hanya berperan dalam menjaga kawasan hutan, tetapi juga menjalankan kegiatan produksi hasil hutan, termasuk pengelolaan komoditas getah pinus pada wilayah yang memiliki tegakan pinus produktif. Pelaksanaan kegiatan tersebut mencakup pengaturan tenaga kerja lapangan, pemantauan kegiatan penyadapan, pengumpulan hasil, hingga pengawasan distribusi dari lokasi produksi menuju titik penampungan. Dalam perspektif manajemen operasional, efektivitas produksi sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola aliran bahan baku, tenaga kerja, serta koordinasi proses secara terintegrasi. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan pada tingkat BKPH menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran produksi getah pinus ((Perhutani, n.d.-c.; Chopra & Meindl, 2016).

BKPH Banjaran dipandang relevan sebagai objek penelitian karena karakteristik pengelolaannya mencerminkan kompleksitas rantai pasok komoditas kehutanan. Proses produksi getah pinus tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga dipengaruhi oleh pengaturan jadwal penyadapan, ketepatan pengumpulan hasil, kondisi akses wilayah, serta kelancaran arus informasi antarunit kerja. Dalam pengelolaan hasil hutan,

hambatan transportasi, koordinasi lapangan, dan ketidakpastian pasokan merupakan faktor yang dapat memengaruhi efisiensi distribusi secara keseluruhan. Apabila salah satu tahapan tersebut tidak berjalan optimal, maka kinerja pasokan dapat terganggu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan getah pinus di BKPH Banjaran tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi, tetapi juga erat kaitannya dengan efektivitas rantai pasok dari hulu hingga distribusi hasil (Chopra & Meindl, 2016).

Meskipun BKPH Banjaran memiliki potensi dalam pengelolaan komoditas getah pinus, pelaksanaan produksi di lapangan tidak selalu berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dalam beberapa periode, realisasi produksi dapat mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi operasional maupun faktor alam. Ketidakesesuaian antara target dan capaian produksi menunjukkan bahwa proses pengelolaan getah pinus masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi output. Bagi unit usaha yang bergantung pada kontinuitas pasokan, kondisi tersebut menjadi perhatian karena capaian produksi merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan sumber daya hutan (Perhutani, n.d.-c.; Chopra & Meindl, 2016).

Tabel 1. 1 Data Produksi Getah Pinus BKPH Banjaran Tahun 2025

Target Produksi	Realisasi Produksi	Selisih Produksi	Persentase Capaian
249.451 ton	221.981 ton	27.470 ton	88,98%

Sumber: Data Produksi BKPH Banjaran Tahun 2025, diolah oleh Perum Perhutani KPH Bandung Selatan.

Tabel 1. 2 Volume Produksi Getah Pinus Berdasarkan Periode Tahun 2025

No	Priode Produksi	Volume (Ton)	Persentase (%)
1.	Januari–Juni 2025	108.349	48,81
2.	Juli–Desember 2025	114.632	51,19
TOTAL		221.981	100,00

Sumber: Data Produksi BKPH Banjarn Tahun 2025, diolah oleh Perum Perhutani KPH Bandung Selatan.

Berdasarkan Tabel 1.1, target produksi getah pinus BKPH Banjarn pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 249.451 ton, namun realisasi produksi hanya mencapai 221.981 ton atau sebesar 88,98% dari target yang direncanakan. Dengan demikian, terdapat selisih produksi sebesar 27.470 ton yang menunjukkan bahwa capaian produksi masih berada di bawah ekspektasi perusahaan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa proses pengelolaan produksi getah pinus belum berjalan secara optimal, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan operasional di lapangan. Ketidaktercapaian target tersebut menunjukkan masih adanya kendala dalam pengelolaan getah pinus sehingga diperlukan analisis lebih lanjut terhadap proses rantai pasok dan faktor-faktor operasional yang memengaruhi efektivitas pengelolaannya (Data Produksi BKPH Banjarn, 2025).

Berdasarkan Tabel 1.2, volume produksi getah pinus BKPH Banjarn pada tahun 2025 terbagi ke dalam dua periode. Pada Periode I, volume produksi mencapai 108.349 ton atau 48,81% dari total produksi tahunan, sedangkan pada

Periode II meningkat menjadi 114.632 ton atau 51,19%. Perbedaan volume produksi antarperiode menunjukkan bahwa capaian produksi belum berlangsung secara seragam sepanjang tahun. Variasi tersebut mengindikasikan adanya pengaruh faktor-faktor operasional maupun kondisi lingkungan yang dapat memengaruhi proses produksi getah pinus. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap proses rantai pasok agar setiap tahapan operasional dapat berjalan secara lebih efektif. (Heizer et al., 2020).

Salah satu faktor yang memengaruhi capaian produksi adalah aspek operasional. Kegiatan penyadapan getah pinus sangat bergantung pada ketersediaan tenaga kerja lapangan, kedisiplinan jadwal penyadapan, keterampilan penyadap, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Apabila salah satu aspek tersebut tidak berjalan secara optimal, volume hasil sadapan berpotensi menurun sehingga memengaruhi kelancaran proses rantai pasok. Dalam perspektif manajemen operasi, efektivitas pelaksanaan setiap aktivitas operasional menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target produksi (Heizer et al., 2020).

Selain faktor internal, kegiatan produksi getah pinus juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang melekat pada karakteristik kawasan hutan. Faktor cuaca, curah hujan, akses jalan menuju lokasi sadap, serta sebaran area tegakan pinus dapat memengaruhi kelancaran proses penyadapan maupun pengangkutan hasil. Pada musim hujan misalnya, kegiatan lapangan berpotensi mengalami hambatan sehingga volume produksi dan kecepatan distribusi dapat menurun.

Karakteristik geografis tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan komoditas kehutanan memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan kegiatan produksi pada sektor manufaktur biasa (Rachmalia et al., 2022).

Kendala-kendala tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap volume produksi yang dihasilkan, tetapi juga berdampak pada efektivitas rantai pasok secara menyeluruh. Ketika hasil sadapan tidak terkumpul tepat waktu atau volume pasokan berfluktuasi, proses distribusi menuju titik penampungan maupun pengguna selanjutnya dapat terganggu. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya operasional, menurunkan efisiensi waktu, serta menyulitkan proses perencanaan produksi berikutnya. Dengan demikian, persoalan yang terjadi di BKPH Banjaran tidak dapat dipandang semata sebagai masalah produksi, melainkan berkaitan erat dengan efektivitas sistem rantai pasok yang berjalan dari hulu hingga hilir (Chopra & Meindl, 2016).

Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan getah pinus di BKPH Banjaran menunjukkan bahwa kendala produksi tidak dapat dipandang sebagai persoalan tunggal pada tahap penyadapan saja. Proses pengelolaan komoditas ini melibatkan rangkaian aktivitas yang saling terhubung, mulai dari perencanaan target produksi, penyediaan tenaga kerja, pelaksanaan penyadapan, pengumpulan hasil, hingga distribusi ke titik penampungan. Apabila salah satu tahapan mengalami hambatan, maka tahapan lainnya berpotensi ikut terdampak. Oleh karena itu, persoalan yang terjadi di BKPH Banjaran perlu dianalisis melalui

pendekatan rantai pasok agar hubungan antarproses dapat dipahami secara menyeluruh (Chopra & Meindl, 2016).

Penerapan pendekatan rantai pasok menjadi relevan karena keberhasilan suatu sistem tidak semata-mata ditentukan oleh tingkat produksi yang dihasilkan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola arus barang, informasi, dan sumber daya secara efektif. Analisis terhadap setiap proses dalam rantai pasok diperlukan untuk mengidentifikasi hubungan antaraktivitas, mengetahui potensi kendala operasional, serta menentukan upaya perbaikan yang sesuai. Dengan demikian, diperlukan suatu kerangka analisis yang mampu menggambarkan proses rantai pasok secara menyeluruh. (Heizer et al., 2020).

Supply Chain Operations Reference (SCOR) merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk memetakan, menganalisis, dan mengevaluasi proses rantai pasok melalui enam proses utama, yaitu Plan, Source, Make, Deliver, Return, dan Enable (APICS, 2017). Model SCOR memungkinkan setiap proses dalam rantai pasok dianalisis secara terstruktur sehingga hubungan antaraktivitas dapat dipahami secara menyeluruh. Selain itu, model ini juga membantu mengidentifikasi berbagai faktor operasional yang memengaruhi efektivitas rantai pasok. Oleh karena itu, SCOR dipandang sesuai sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai proses rantai pasok getah pinus di Perum Perhutani BKPH Banjaran KPH Bandung Selatan. (APICS, 2017).

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan, pengelolaan getah pinus di BKPH Banjaran memerlukan evaluasi yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian target produksi, tetapi juga mencakup keseluruhan proses rantai pasok yang mendukung kegiatan operasional. Ketidaktercapaian realisasi produksi dibandingkan target yang telah ditetapkan menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam sistem pengelolaan yang berjalan. Selain itu, kompleksitas kegiatan lapangan, kebutuhan koordinasi antarunit kerja, serta pentingnya efisiensi distribusi menunjukkan bahwa efektivitas rantai pasok merupakan aspek yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, penelitian dengan judul **"ANALISIS RANTAI PASOK GETAH PINUS MENGGUNAKAN MODEL *SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE* (SCOR) PADA PERUM PERHUTANI BKPH BANJARAN KPH BANDUNG SELATAN"** penting dilakukan untuk menganalisis proses rantai pasok berdasarkan model SCOR serta mengidentifikasi faktor-faktor operasional yang memengaruhi efektivitas rantai pasok getah pinus.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, diketahui bahwa pengelolaan rantai pasok getah pinus di Perum Perhutani BKPH Banjaran KPH Bandung Selatan masih menghadapi berbagai kendala operasional yang berpotensi memengaruhi efektivitas rantai pasok. Oleh karena itu, untuk

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses rantai pasok getah pinus pada Perum Perhutani BKPH Banjaran KPH Bandung Selatan berdasarkan model Supply Chain Operations Reference (SCOR)?
2. Apa saja faktor operasional dan lingkungan yang memengaruhi efektivitas rantai pasok getah pinus pada Perum Perhutani BKPH Banjaran KPH Bandung Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses rantai pasok getah pinus berdasarkan model Supply Chain Operations Reference (SCOR) serta mengidentifikasi faktor-faktor operasional yang memengaruhi efektivitas rantai pasok getah pinus pada Perum Perhutani BKPH Banjaran KPH Bandung Selatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis proses rantai pasok getah pinus pada Perum Perhutani BKPH Banjaran KPH Bandung Selatan berdasarkan model Supply Chain Operations Reference (SCOR).
2. Mengidentifikasi faktor operasional dan lingkungan yang memengaruhi efektivitas rantai pasok getah pinus pada Perum Perhutani BKPH Banjaran KPH Bandung Selatan. aktor-faktor operasional yang

memengaruhi efektivitas rantai pasok getah pinus pada Perum Perhutani BKPH Banjaran KPH Bandung Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penerapan manajemen rantai pasok pada sektor kehutanan, khususnya dalam pengelolaan komoditas getah pinus. Analisis menggunakan model SCOR diharapkan mampu memberikan masukan dalam mengevaluasi seluruh proses rantai pasok berdasarkan model SCOR yang meliputi Plan, Source, Make, Deliver, Return, dan Enable dalam mendukung kelancaran operasional. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji kinerja rantai pasok pada sektor berbasis sumber daya alam dengan karakteristik operasional yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan wilayah kerja.

1.4.2 Secara Praktisi

1. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi wadah bagi penulis untuk menerapkan konsep manajemen rantai pasok yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam kondisi operasional yang nyata. Melalui penelitian ini, penulis dapat mengembangkan kemampuan dalam menganalisis permasalahan, mengidentifikasi faktor penyebab, serta menyusun

alternatif perbaikan berdasarkan data dan temuan lapangan. Selain itu, penelitian ini turut memperluas pemahaman penulis mengenai pengelolaan rantai pasok pada sektor kehutanan sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja di bidang logistik dan manajemen rantai pasok.

2. Bagi Program Studi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi akademik dalam pengembangan ilmu manajemen rantai pasok di lingkungan Program Studi Diploma IV Manajemen dan Administrasi Logistik Universitas Diponegoro. Temuan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan gambaran kontekstual mengenai penerapan konsep rantai pasok pada sektor berbasis sumber daya alam. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kontekstual mengenai penerapan model SCOR pada sektor kehutanan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pendukung pembelajaran pada kajian manajemen rantai pasok dan evaluasi kinerja operasional.

3. Bagi Peusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi BKPH Banjarn dalam mengevaluasi pelaksanaan rantai pasok getah pinus, khususnya pada aspek perencanaan, penyediaan sumber daya, dan distribusi hasil sadapan. Temuan penelitian dapat

digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi hambatan yang terjadi di lapangan serta menyusun upaya perbaikan yang mendukung kelancaran operasional dan keberlanjutan pasokan getah pinus.